

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak - banyaknya pengetahuan, mengorganisasikannya untuk usaha - usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua berpedoman pada Rencana Strategis lima tahunan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019 - 2023 yang digunakan sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugasnya. Rencana Strategis ini merupakan sebuah komitmen yang dibangun berdasarkan visi, misi, sasaran, tujuan dan nilai-nilai luhur yang dianut. Komitmen ini berimplikasi pada seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional dan pegawai yang ada untuk menegakkan dan melaksanakannya tanpa perkecualian, karena komitmen itulah yang akan menjadi motor bagi optimalisasi pencapaian tujuan Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua dalam suatu kurun waktu 2019 - 2023.

Arti penting Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam Perencanaan Strategis 2019 - 2023 bagi Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua adalah untuk menetapkan arah yang akan dituju dan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Renstra ini adalah manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan internal maupun eksternal sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan-perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

Menyadari begitu besarnya perubahan lingkungan strategis yang terjadi, maka diperlukan komitmen yang tinggi untuk senantiasa mengantisipasi dan menuangkan dalam butiran tekad/perjanjian untuk direalisasikan menjadi hal yang nyata. Jika diperlukan, maka Renstra ini pun dapat diubah dan disesuaikan lagi perkembangannya atau perubahan lingkungan strategis.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan program beserta indikator hasil program yang dapat diukur. Komponen - komponen Perencanaan Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Visi Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua.

**“MENJADIKAN BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI PAPUA DI JAKARTA SEBAGAI PUSAT INFORMASI PEMBANGUNAN, DATA, INVESTASI, PROMOSI DAN KERJA SAMA DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PAPUA BANGKIT MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN “**

Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut, termasuk perancangan rencana strategis secara keseluruhan, pengenaan sumber daya, pengembangan indikator kerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi pengukuran kinerja yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh instansi tersebut.

## 2. Misi

- (1) Menata Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lingkungan Badan Penghubung Daerah menjadi SDM yang terampil, Inovativ dan Profesional.
- (2) Melakukan komunikasi, koordinasi dan kerja sama (3 K) dengan Kementerian/Lembaga, Mitra Donor/Kedutaan Asing , 29 Kabupaten/Kota OPD lingkup Provinsi Papua , Pihak Swasta local dan Nasional dan Stake Holders terkait.
- (3) Melakukan kajian, Pengumpulan dan Analisis data potensi sumber daya alam dan budaya asli masyarakat Papua yang tersebar di 5 (lima) Wilayah Adat Pengembangan Pembangunan Provinsi Papua.
- (4) Melakukan Sinergitas Pembangunan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan sinergitas kebijakan, Regulasi, Kelembagaan Keuangan dan Perencanaan Pembangunan.
- (5) Melakukan Sosialisasi promosi Potensi Sumber Daya Alam dan potensi Budaya Masyarakat asli papua yang tersebar di 5 (lima) Wilayah Adat Papua baik di Dalam Negeri maupun di luar Negeri.
- (6) Membantu mendukung Penataan Aset Pemerintah Provinsi Papua yang berada di luar wilayah Provinsi Papua.
- (7) Berperan aktif mensosialisasikan dan menginformasikan penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasiopnal (PON) ke 20 di Provinsi Papua

Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus, dimana pernyataan misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Suatu pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus diemban oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut. Misi sebagai pernyataan cita - cita merupakan landasan kerja yang harus diikuti dan seharusnya mendukung keseluruhan misi organisasi.

### 3. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi organisasi. Tujuan Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua yang telah ditetapkan dalam Renstra adalah :

- (1) Mewujudkan kapasitas Kelembagaan Badan Penghubung Daerah yang berkualitas.
- (2) Meningkatkan kehumasan/protokoler dan hubungan antar lembaga serta koordinasi dengan mitra-mitra kerja atau pihak lainnya di Jakarta dan daerah lainnya.
- (3) Meningkatkan Kerja Sama Daerah dan Promosi potensi budaya, pariwisata serta peluang investasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Papua melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada.
- (4) Meningkatkan pelayanan informasi dan pembinaan masyarakat Provinsi Papua yang bedrada di Jakarta dan sekitarnya.
- (5) Mewujudkan pembinaan Sosial, Budaya dan Politik Masyarakat Papua di Jawa dan Bali,
- (6) Mewujudkan Peningkatan Promosi Potensi Budaya dan Pariwisata Daerah Papua di Anjungan Daerah Papua Taman Mini Indonesia Indah Jakarta.

Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan perjanjian kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

Perencanaan dan perjanjian kinerja Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dan pelaksanaan Renstra dalam perencanaan tahunan Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua.

#### 1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Tahun 2024 diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua sebagai unit kerja eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, perencanaan kinerja diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, RKT tersebut adalah satu bentuk implementasi (pemanfaatan) dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Renstra dalam perencanaan kinerja tahunan.

## 2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk ;

- a. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Pemerintahan, dan
- d. Dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua merupakan penegasan dari hasil yang diperjanjikan akan dicapai oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua dalam melaksanakan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari Perencanaan Strategis dengan tetap mempertimbangkan perubahan - perubahan lingkungan yang terjadi dan tetap berpedoman pada beberapa kebijakan pemerintah pusat dengan tidak mengurangi esensi Perencanaan Strategis yang telah dikemukakan di atas.

Pada Tahun 2022, Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua telah membuat Rencana Strategis Priode Tahun 2019 - 2023 telah menetapkan empat sasaran strategis dengan empat indikator kinerja sasaran. Dari empat sasaran strategis dan empat indikator kinerja sasaran semua di tetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Rincian sasaran strategis, IKU dan target Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1		2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya kapasitas kelembagaan Badan Penghubung Daerah yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur, manajemen kelembagaan dan sarana dan prasarana pada Badan Penghubung Daerah		Presentase hasil fasilitasi yang terlaksana dalam hubungan antar lembaga Aparatur Pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah	100%	

				Daerah		
2.	Meningkatnya kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga serta koordinasi dengan mitra kerja atau pihak lainnya di Jakarta dan daerah lainnya	Peningkatan Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah Pusat, Swasta dan Pihak Lainnya melalui jalinan kerjasama		Persentase hasil fasilitasi yang terlaksana dalam hubungan antar lembaga Aparatur Pemerintah Provinsi Papua dengan lembaga internasional dan swasta	100%	
3.	Meningkatnya kerjasama Daerah dan Promosi dan hasil Daerah di bidang ekonomi, sosial, budaya, pariwisata serta peluang investasi di Provinsi dan Kab/ Kota se Papua	Penyediaan Data potensi budaya, pariwisata dan investasi daerah yang terkini		Presentase hasil fasilitasi promosi potensi Provinsi Papua di bidang ekonomi, sosial budaya dan pariwisata	100%	
4.	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Pembinaan Masyarakat Provinsi Papua yang berada di Jakarta dan kota - kota di Pulau Jawa	Terbinanya masyarakat Provinsi Papua di Jakarta dan sekitarnya dengan pendekatan sosial kemasyarakatan		Presentase hasil inventarisasi dan pemetaan masyarakat Provinsi Papua di Jakarta dan kota - kota lain di Pulau Jawa	100%	

Sebagai unit kerja Eselon III, Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas pencapaian sasaran strategisnya sebagaimana ditargetkan dalam dokumen penetapan kinerja. Disamping itu karena didalam Renstra juga telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pencapaian program, maka dalam Laporan Kinerja ini disajikan sejauh mana tingkat pencapaian Perjanjian Kinerja dan IKU. Tingkat pencapaian sasaran strategis dan program tersebut disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja (PK) yang secara lengkap disajikan dalam lampiran I, II dan III.

Penjelasan uraian lebih lanjut mengenai pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya hubungan antara lembaga dan Pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah Pusat, Swasta dan Pihak – pihak lainnya di Jakarta.  
Sasaran yang dicapai melalui indikator kinerja presentase hasil fasilitasi yang terlaksana dalam hubungan antar lembaga Aparatur Pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya kerjasama kemasyarakatan.  
Sasaran tersebut dicapai melalui indikator kinerja yaitu Meningkatkan pengembangan pembinaan kemasyarakatan dan mahasiswa. Indikator ini ditetapkan sebagai IKU dan diukur dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk masyarakat Papua dan masyarakat asli Papua.
3. Meningkatnya pelayanan informasi kepada publik.  
Sasaran tersebut dicapai melalui indikator kinerja yaitu Meningkatnya informasi dalam bentuk buku panduan dan audio visual ditetapkan sebagai IKU dan diukur dengan cara mempromosikan budaya dan menarik investor untuk pengembangan daerah.

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memperoleh anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dimaksud.

Terdapat dua jenis program yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua yaitu program utama dan program pendukung.

Program utama adalah program-program yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, sedangkan program pendukung adalah program - program yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah yang sifatnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

1. Program Utama :

- 1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Arah kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua, yang bertanggung jawab dan transparan dan tersaji dalam suatu proses manajemen keuangan sesuai arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan. Sebagai indikator dari hasil yang diharapkan adalah tersusunnya laporan - laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik, terukur dan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya, kegiatan dalam program ini meliputi :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD.
  2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
  3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
  4. Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD
  5. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- 2) Program Pelayanan Informasi.
- Program ini sebagai sarana penyebarluasan informasi Data dan merupakan bahan promosi dan investasi di Provinsi Papua.
1. Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Alam
  2. Penyediaan Data dan Informasi Budaya Papua.
- 3) Program Pembinaan Kemasyarakatan dan Mahasiswa.
- Mewujudkan pembinaan masyarakat Papua yang berada di Jakarta dan sekitarnya serta memberikan informasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada Masyarakat.
1. Terselenggaranya kegiatan Focus Group Diskusi/Seminar “Papua Update” bekerja sama dengan perguruan tinggi di Jakarta dan Yogyakarta.
  2. Terselenggaranya kegiatan Festival kopi dan kuliner khas Papua
- 4) Program Pengembangan Penataan dan Pentas Anjungan .
- Program ini sebagai penyebarluasan informasi Budaya dan Destinasi Pariwisata melalui UPTB Pengelolaan Anjungan Papua di TMII dengan kegiatan :
1. Terselenggaranya Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Budaya Papua
  2. Optimalisasi pengelolaan Anjungan Papua di TMII
2. Program Pendukung
- 1) Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Provinsi
- Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakan mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima suatu pelayanan administrasi perkantoran. Indikator hasil dari pelayanan ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengelolaan administrasi barang. Sifat kegiatan dari program ini yaitu :
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  2. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah.

2) Program Pelayanan Penghubung

Arah kebijakan dari program ini adalah kegiatan yang dilaksanakan di Badan Penghubung Daerah.

Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung yang ada dalam program ini mengarah pada upaya optimalisasi Budaya Papua. Kegiatan dalam program ini adalah :

1. Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Budaya.